**TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN DANA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM BIDANG EKONOMI DI DESA/KELURAHAN DI KOTA BANDUNG**

**ARTIKEL**

Dibuat Untuk memenuhi Sarat Memenuhi Sidang Akhir Program Magister Hukum

**Di susun oleh :**

|  |  |
| --- | --- |
| Nama : | Restha Egnisa |
| NPM : | 148040002 |
| Konsentrasi : | Hukum Ekonomi |

**Di bawah Bimbingan :**

**Dr. T . Subarsyah, SH., S.Sos., Sp-1., MM**

**Dr. Atang Irawan , SH., MH**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS PASUNDAN**

**BANDUNG 2017**

**ABSTRAK**

Keberadaan UMKM merupakan hal yang penting, karena saat terjadi krisis ekonomi 1997, UMKM memegang peranannya sebagai usaha yang tetap bertahan. Keberadaan UMKM yang semakin meningkat, membutuhkan bantuan dari pemerintah sebagai pengelola APBD, yang diharapkan dapat berusaha menciptakan daya saing dan meningkatkan kemampuan UMKM dalam menghadapi MEA 2016. Tujuan dari penelitian ini, untuk: (1) mengetahui dan mengkaji peranan bansos dalam memberikan hibah agar daya saing UMKM dalam menghadapi MEA 2016 meningkat; dan (2) merumuskan pertanggungjawaban hukum terhadap dana hibah dan bantuan sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPD) bagi UMKM dihubungkan dengan upaya pemberdayaan ekonomi.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian deskripstif analitis, yaitu dengan meneliti data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif. Penelitian ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah beserta Peraturan Pelaksana dan regulasi yang ditetapkan.

Hasil dari penelitian ini adalah: 1. Pengaruh pemberian dana hibah dan bantuan sosial pada UMKM di tingkat kelurahan tidak berpengaruh secara signifikan, karena pada dasarnya kemadirian UMKM muncul karena adanya kreativitas. Pemerintah dalam memberdayakan UMKM sebaiknya kepada program pengenalan produk agar mendapatkan pangsa pasar, peningkatan keterampilan, dan kemudahan UMKM mengurus perizinan.Kelompok UMKM yang mendapatkan hibah ataupun bantuan sosial pada dasarnya harus memiliki izin usaha, dengan adanya hal ini mendorong UMKM untuk melengkapi legalitasnya yang tentunya akan memudahkan pemerintah daerah dalam mengelola pajak. Permendagri mengenai hibah memberikan batasan yang jelas penggunaan anggaran hibah, hal ini menjadikan ketertiban pemberian hibah untuk tidak diselewengkan oknum karena ada tolak ukur yang jelas.Hasil penelitian dengan adanya keterlibatan pemerintah Kota Bandung yang berusaha meningkatkan industri kreatif yang dilakukan pengusaha muda, cukup berpengruh. Karena Pemerintah memberikan persyaratan perizinan yang mudah, mengenalkan produk ke mancanegara, dan menyalurkan dana Kredit Usaha Mikro sebagai modal menjalankan UMKM.2.Pertanggungjawaban hukum Pemerintah Daerah selaku pemberi hibah:1) Pemerintah Daerah membagikan dana hibah yang bersumber dari keuangan negara, jika ada penyelewangan dalam penggunaannya dapat dikategorikan sebagai tindakan korupsi. Yang berwenang dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan korupsi dalam hal ini institusi Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK2)BPK sebagai Lembaga Tinggi negara yang memiliki fungsi audit, melakukan pemeriksaan penggunaan anggaran dan hibah Pemerintah Daerah. Hasil audit diberikan penilaian terhadap keuangan daerah, maupun jika ada indikasi korupsi meneruskan informasi kepada lembaga yang berwenang melakukan penyidikan.b. Sedangkanpertanggungjawaban hukum UMKM selaku penerima hibah, antara lain:1)Penyelewangan dana yang dilakukan penerima hibah untuk pertanggungjawabannya dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi karena kaitannya dengan keuangan negara.2) Penerima hibah pun bertanggungjawab atas kelangsungan kegiatan yang dilakukan karena untuk membuka suatu usaha harus memiliki izin dari instansi yang terkait usahanya. Jika izin tidak dipenuhi, akan menerima sanksi administrasi, perdata, ataupun pidana.3)UMKM sebagai penerima hibah harus memberikan laporan yang sesuai dengan yang diajukan setelah pelaksanaannya kepada Pemerintah Daerah.

**kata kunci : bantuan sosial, daya saing, pertanggung jawaban**

**ABSTRACTION**

The existence of UMKM is important, because during the 1997 economic crisis, UMKM played a role as a business that persisted. The increasing presence of UMKMs requires assistance from the government as the manager of the APBD, which is expected to try to create competitiveness and improve the ability of UMKM in the face of MEA 2016. The purpose of this study is to: (1) know and review the role of social assistance in providing power the competitiveness of UMKM in the face of MEA 2016 increases; and (2) formulating legal responsibility for grants and socialassistance sourced from the Regional Revenue and Expenditure Budget (ABPD) for UMKM associated with economic empowerment efforts.

This research was conducted using a normative juridical approach and analytical descriptive research specifications, namely by examining secondary data consisting of primary legal materials and secondary legal materials. The data obtained were analyzed qualitatively juridically. This research refers to Law Number 23 of 2014 concerning Regional Governments along with the Implementing Regulations and regulations stipulated.

The results of this study are: 1. The effect of granting grants and social assistance to UMKM at the kelurahan level has no significant effect, because basically the kemadirian of UMKM arises because of creativity. The government in empowering UMKM hould prefer product recognition programs in order to gain market share, increase skills, and facilitate UMKM to manage permits. MSME groups that receive social grants or assistance must basically have a business license, with this encouraging UMKM to complete their legality. facilitate local governments in managing taxes. “Permendagri” regarding grants provides clear limits on the use of the grant budget, this makes order giving grants not to be misused because there are clear benchmarks. The results of the research with the involvement of the Bandung City government are trying to improve the creative industry by young entrepreneurs, quite chaotic. Because the Government provides easy licensing requirements, introduces products to foreign countries, and distributes Micro Business Credit funds as capital to run UMKM.2. The legal responsibility of the Regional Government as the grantor of the grant: 1) The Regional Government distributes grant funds sourced from state finances, if there is fraud in its use it can be categorized as an act of corruption. The authorities in conducting investigations and investigating corruption in this case the Police, Prosecutor's Office, and KPK 2) BPK as the State High Institution that has an audit function, checks the use of budgets and Local Government grants. The audit results are given an assessment of regional finances, as well as if there is an indication of corruption forwarding information to the institution authorized to conduct the investigation. B. While the legal responsibilities of UMKM as grant recipients, among others: 1) Fund misappropriation by the recipient of the grant for accountability is categorized as a criminal act of corruption because of its relation to state finances.2) The recipient of the grant is also responsible for the continuity of activities carried out because to open a business must have a permit from agencies related to their business. If the permit is not fulfilled, it will receive administrative, civil, or criminal sanctions. 3) UMKM as grant recipients must provide reports in accordance with those submitted after their implementation to the Regional Government.

**keywords: social assistance, competitiveness, accountability**